

KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Afriaji¹

Email: muhammad.afriaji64@gmail.com

Anita Rahmayanti²

Email: anitarahmayanti021@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

ABSTRAK

UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal tersebut menunjukkan seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali, sehingga pemerintah harus mampu mengelola dan menyelenggarakan pendidikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan dan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor-faktor yang menghambat kinerja tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik deskriptif. Data menggunakan data primer dan data sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Model kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja menurut Agus Dwiyanto yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya adanya pengelolaan dana BOS dan penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) disetiap sekolah sebagai upaya dalam mencegah anak putus sekolah, selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat menyelenggarakan Pendidikan untuk anak yang sudah terlanjur putus sekolah. Faktor yang menjadi penghambat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya kurangnya tenaga kerja yang mumpuni dalam mengatasi dan mencegah anak putus sekolah, ditambah penyelenggaraan program pencegahan anak putus sekolah yang belum tepat sasaran.

ABSTRACT

Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that: "Every citizen has the right to education". This shows that all Indonesian citizens have the right to get a decent education without exception, so the government must be able to manage and organize education to meet the community's need for education. The aim of this research is to determine the performance of the Department of Education and Culture in dealing with out-of-school children in Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency as well as the factors that hinder this performance and the efforts made to overcome them.

The research was carried out at the North Hulu Sungai Regency Education and Culture Service, Central Amuntai District. This research uses qualitative research methods with descriptive techniques. Data uses primary data and secondary data. The number of informants in this research was 5 people. Data collection techniques through interviews, documentation and observation. Analyzing data using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The performance model used in this research is performance theory according to Agus Dwiyanto which consists of productivity, service quality, responsiveness, accountability, accountability.

The results of the research show that the performance of the Education and Culture Service in dealing with out-of-school children in Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency is quite optimal, this can be seen from the management of BOS funds and the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in every school as an effort to prevent children drop out of school, apart from that, the Department of Education and Culture also formed a Community Learning Activity Center (PKBM) so that it can provide education for children who have already dropped out of school. Factors that hinder the performance of the Department of Education and Culture include the lack of qualified workforce to deal with and prevent children from dropping out of school, plus the implementation of programs to prevent children from dropping out of school that are not yet on target.

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal tersebut menunjukkan seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Jadi, pemerintah harus mampu mengelola dan menyelenggarakan pendidikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yaitu terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan yang diwajibkan bagi seluruh warganya adalah pendidikan dasar dua belas tahun, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan masyarakat adalah dari faktor ekonomi. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung mengalami peningkatan. Meningkatnya penduduk miskin di Hulu Sungai Utara dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan yang baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini bisa menjadi penyebab yang mempengaruhi meningkatnya jumlah siswa putus sekolah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat sebuah kegiatan yang menyasar pada pencegahan siswa putus sekolah. Hal ini memiliki tugas membantu pemerintah kota dalam menangani urusan di bidang pendidikan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti tertarik mengadakan penelitian

tentang **“Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di kecamatan Amuntai Tengah kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa sajakah faktor penghambat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- c. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak

putus sekolah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis dari dalam aspek keilmuan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi negara.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk mengetahui permasalahan anak putus sekolah sehingga dapat memberikan informasi pada orang tua betapa pentingnya pendidikan.

TINJAUAN TEORITIS

1. Kinerja Organisasi Publik

Agus Dwiyanto (2012:49-51) dalam bukunya Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia menjelaskan beberapa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

- a. Produktivitas yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output. Karakteristik-karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
- b. Kualitas Layanan, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat

terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.

- c. Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e. Akuntabilitas yaitu menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan usaha mewujudkan visi organisasi merupakan arah yang menentukan kemana organisasi akan dibawa dan apa yang akan dicapai oleh organisasi untuk masa depan.

2. Anak Putus Sekolah

Pengertian mengenai anak putus sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah siswa yang belum sampai tamat sekolahnya sudah berhenti. Pendapat dari Ali Imron, (2004:125) menyatakan bahwasanya yang dimaksud siswa putus sekolah adalah siswa yang dinyatakan telah keluar dari sekolah yang bersangkutan sebelum

waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus dan mendapat ijazah dari sekolah.

Hal senada diungkapkan oleh Nazili Shaleh Ahmad (2011:86) bahwa yang dimaksud dengan putus sekolah yaitu berhentinya belajar seorang murid baik di tengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti sekolah. Hal ini berarti putus sekolah dimaksudkan untuk semua anak yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa putus sekolah adalah tidak terselesaikannya seluruh masa belajar pada suatu jenjang pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik deskriptif. Data menggunakan data primer dan data sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Model kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja menurut Agus Dwiyanto yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengatasi Anak

Putus Sekolah Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Produktivitas

Pada dasarnya produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dengan output, konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

1) Input

Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) belum dapat dikatakan memadai, karena masih ada kegiatan yang dilimpahkan ke satu orang pegawai sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri ada bermacam-macam pekerjaan, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mensiasatinya dengan mempekerjakan tenaga honorer.

2) Output

Output berupa anggaran sudah dapat dikatakan dengan baik, walaupun anggaran biaya pendidikan untuk anak putus sekolah belum ada, namun pemerintah sudah menganggarkan untuk tahun berikutnya untuk menunjang pelaksanaan pendidikan maupun pekerjaannya.

b. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap

kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

- 1) Kemudahan Mendapatkan Layanan
kemudahan mendapatkan pelayanan dapat dilihat dengan sejauh mana masyarakat mengetahui program-program bantuan pendidikan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana SKPD di bidang pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan sebuah program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebagai pendamping program Dana BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) ini dilakukan untuk meminimalisir anak putus sekolah.

- 2) Kenyamanan dalam Pelayanan

Anak-anak putus sekolah yang sudah terdata oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya ada yang sudah menerima dan ada yang bukan penerima di atas dapat disimpulkan bahwa kenyamanan dalam pelayanan melalui program biaya pendidikan dan sosialisasi sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya, sehingga dapat mempermudah proses pelayanan apabila masyarakatnya sudah banyak yang mengetahui dan paham.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- 1) Pengembangan Program

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mensubsidi biaya pendidikan untuk memotivasi anak agar tidak putus sekolah lagi namun berdasarkan hasil observasi di lapangan dan dokumentasi bahwa masih ditemukan anak putus sekolah, berarti hal ini membuktikan bahwa pengembangan program tentang anak putus sekolah belum berjalan dengan baik. Namun untuk mensiasatinya yaitu dengan menindak lanjuti dari program PIP untuk siswa yang kurang mampu.

- 2) Penyusunan Agenda Pencegahan Anak Putus Sekolah

Agenda yang ditempuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mengatasi anak putus sekolah dari faktor ekonomi adalah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan. Intervensi yang dilakukan pemerintah dengan mensubsidi biaya pendidikan harapannya secara tidak langsung akan meningkatkan partisipasi warganya untuk melanjutkan pendidikan sehingga meminimalisir anak-anak dari putus sekolah. Sementara dari hasil observasi di lapangan dan dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melakukan pendekatan untuk factor anak putus sekolah karena lingkungan. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mencari pendekatan dalam mencegah dan mengatasi anak putus sekolah karena faktor selain ekonomi.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan yang berkembang pada masyarakat yang meliputi prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

1) **Komitmen**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan PKBM yang ada di kecamatan bertugas sebagai jembatan koordinasi antar Instansi di wilayah yakni kecamatan dan kelurahan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pucuk pimpinan organisasi.

2) **Kesesuaian dengan Prosedur**

Kesesuaian dengan prosedur sudah bagus dan masyarakat sudah mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana anak-anak putus sekolah dibantu untuk disekolahkan lagi secara gratis.

e. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.

1) **Tanggungjawab dalam kegiatan sebagai pelaksana monitoring**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mengontrol sejauh mana anak putus sekolah yang sudah tersalurkan ke PKBM dan saat ini sudah mengadakan

ujian akhir semester. Namun hasil observasi di lapangan masih banyak ditemukan anak yang malas untuk mengikuti kegiatan belajar di PKBM, hal tersebut yang selalu dilakukan pengontrolan dan menjadi bahan evaluasi jika ternyata masih ditemukan kasus seperti ini.

2) **Sanksi sebagai pertanggungjawaban dalam kegiatan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sanksi bagi siapa saja yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun dilihat dari hasil observasi di lapangan, sejauh ini belum ada pegawai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan pelanggaran berat dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga belum pernah ada yang dijatuhkan sanksi berat namun ada hanya sekedar teguran lisan saja ketika ada kinerja pegawainya yang kurang baik.

2. **Faktor penghambat yang mempengaruhi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara**

a. **Kurangnya tenaga kerja yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pekerjaan**

Sumber daya manusia dalam hal ini kaitannya dengan pegawai di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan sudah memadai. Namun jika dilihat dalam tatanan ideal tentu masih memiliki keterbatasan karena ruang lingkup

pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sangat luas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengurus satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk tenaga pengajar dan siswanya. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatasi keterbatasan tersebut dengan merekrut tenaga honorer. Berdasarkan peraturan yang ada, dinas tidak boleh mengambil tenaga honorer melebihi batas.

b. Program bantuan biaya pendidikan belum tepat sasaran

Masih ditemukan siswa tidak mampu yang belum menerima. Anak-anak putus sekolah yang sudah terdata oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya ada yang sudah menerima dan ada yang bukan penerima di atas dapat disimpulkan bahwa kenyamanan dalam pelayanan melalui program biaya pendidikan dan sosialisasi sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya, sehingga dapat mempermudah proses pelayanan apabila masyarakatnya sudah banyak yang mengetahui dan paham.

c. Pengembangan program yang kurang maksimal sehingga masih banyak ditemukannya anak putus sekolah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya melibatkan peran serta masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun organisasi sosial kemasyarakatan untuk bersama-sama berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi anak putus sekolah di lingkungan sekitarnya, maka perlu adanya

pengembangan program serta penyusunan agenda kegiatan dalam mencegah dan mengurangi anak putus sekolah

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Merekrut tenaga kerja yang bertalenta

Tenaga kerja menjadi aset terpenting dan dapat diibaratkan sebagai kunci kesuksesan sebuah perusahaan/instansi. Dapat dibayangkan, bagaimana kondisi instansi jika karyawan yang ada adalah karyawan yang kurang kompeten di bidangnya. Mereka tidak dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan fungsinya dengan baik. Itulah mengapa merekrut dan mempekerjakan karyawan yang memiliki kualitas tinggi dalam bekerja merupakan hal yang sangat penting.

b. Menentukan kejelasan alokasi anggaran pendidikan dan melakukan akurasi data dan pemutakhiran data agar data yang digunakan tepat sasaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menyumbangkan 20 persen anggaran pendidikan. Dengan kondisi tersebut, logikanya seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali menikmati pendidikan. Namun realitanya, masih banyak anak yang kurang mampu tidak bersekolah. Inilah yang menyebabkan anggaran pendidikan dikatakan belum tepat sasaran. Seharusnya pemerintah mengetahui

proses alokasi dana pendidikan 20 persen tersebut agar tepat sasaran.

Pemerintah juga harus tahu, anggaran tersebut apakah sudah bisa berkolerasi secara positif dengan peningkatan partisipasi anak-anak usia sekolah, dengan peningkatan untuk pendidikan secara keseluruhan. Sesungguhnya jika kita lihat anggaran pendidikan dari waktu ke waktu terus meningkat, karena sesuai dengan pertumbuhan dari kenaikan anggaran APBN. Artinya, kalau APBN naik, logikanya anggaran pun akan naik. Namun kenaikan tersebut tetap belum menunjukkan anggaran pendidikan tepat sasaran. Hal tersebut terbukti dengan masih banyak keluhan warga masyarakat soal punggutan-punggutan yang tidak semestinya terjadi. Korupsi juga menjadi penyebab anggaran pendidikan menjadi tidak tepat sasaran. Dalam situs ini sempat menyinggung soal tindakan korupsi maupun punggutan sejumlah sekolah pada para orangtua murid, padahal pemerintah sudah menganggarkan dana atau bahkan para murid dibebaskan dari beban biaya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada penelitian mengenai Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal:

- a. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Amuntai

Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator: pertama pada sub variabel produktivitas pada indikator input berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa input dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) belum dapat dikatakan memadai, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mensiasatinya dengan mempekerjakan tenaga honorer. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan perekrutan pegawai untuk membantu pekerjaan mereka agar lebih cepat selesai. Untuk indikator output sudah baik karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan intervensi dalam mensubsidi biaya pendidikan melalui program Bantuan Operasional Pendidikan Dana BOS dan Program Indonesia Pintar untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan meminimalisir angka putus sekolah. Kedua sub variabel kualitas layanan yang indikatornya kemudahan mendapatkan layanan melalui program-program bantuan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejauh ini sudah baik untuk kemudahan akan mendapatkan pelayanan pendidikan oleh anak-anak sehingga dapat meminimalisir anak putus sekolah. Untuk indikator kenyamanan dalam pelayanan belum berjalan dengan baik karena dilihat dari program bantuan biaya pendidikan masih banyak penerima bantuan pendidikan yang belum tepat sasaran. Ketiga untuk sub variabel responsivitas yang indikator pengembangan program masih belum dikatakan berjalan dengan baik karena

- dilihat di lapangan masih ditemukannya anak putus sekolah. Untuk indikator penyusunan agenda dalam kegiatan pencegahan anak putus sekolah sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan teori. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim penyelenggara khusus sebagai lanjutan dari Program Indonesia Pintar untuk melakukan pendataan dan verifikasi lapangan terkait adanya anak putus sekolah. Keempat untuk sub variabel responsibilitas yang indikatornya komitmen dan kesesuaian dengan prosedur sudah dilakukan dengan efektif. Kelima untuk sub variabel akuntabilitas yang indikatornya Tanggung jawab dalam kegiatan sebagai pelaksana monitoring sudah dilakukan dengan baik karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi dan monitoring melalui koordinasi tim penyelenggara untuk melihat sejauh mana anak putus sekolah yang sudah tersalurkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk indikator Sanksi sebagai pertanggung jawaban dalam kegiatan sudah baik karena dilihat di lapangan juga tidak terdapat pelanggaran yang berat.
- b. Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat faktor penghambat yaitu Kurangnya tenaga kerja yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pekerjaan, Program bantuan biaya pendidikan belum tepat sasaran, Pengembangan program yang kurang maksimal sehingga masih banyak ditemukannya anak putus sekolah.

- c. Upaya yang harusnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah yaitu dengan melakukan rekrutmen pegawai, menentukan kejelasan alokasi anggaran pendidikan dan melakukan akurasi data dan pemutakhiran data agar data yang digunakan tepat sasaran, melakukan sosialisasi pendidikan yang telah bekerja sama dengan perangkat pemerintahan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan/Desa dan penyediaan taman baca di setiap kelurahan/desa.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan rekrutmen pegawai yang berkompetensi dan sesuai dengan bidangnya untuk membantu ruang lingkup pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sangat luas.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga diharapkan dapat menggunakan data sasaran penerima untuk Program Bantuan Pendidikan yang lebih tepat dan pembaharuannya cepat sehingga dapat mencakup seluruh siswa kurang mampu di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menjaga dan meningkatkan koordinasi yang sudah terjalin dengan baik antara instansi terkait maupun dengan masyarakat sehingga ketika di lapangan masih ditemukan anak putus sekolah agar segera mendapatkan

pelayanan lebih lanjut untuk di data dan disekolahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, 2011. *Pendidikan Dasar Pada Anak*. Jakarta. Trans Info Media.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Febrian, M. Alan. 2018. *Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Dalam Melestarikan Bahasa dan Aksara Lampung*
- Gunawan. 2011. *Remaja dan Permasalahannya*. Yogyakarta. Hanggar Kreator.
- Ihsan, Fuad. 2011. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Imron, Ali. 2004. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Malang: Departemen Pendidikan Nasional.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPEE Universitas Gajah Mada.
- Moeheriono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia
- Moeleong, L.K. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Zaenal dan Laksana Muhibun. 2016. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: Kencana.
- Nazili Ahmad Shaleh. 2011. *Pendidikan Dan Masyarakat*. Yogyakarta. Sabda Media.
- Ramadhan, Restu. 2017. *Implementasi Program Tangerang Cerdas tingkat SMPN di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2016*.
- Saputra, Ricardo. 2010. *Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2012-2015*.
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo, 2011. *Manajemen Kinerja*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Umam, Khaerul. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia